

**PROFESIONALITAS NAZHIR DALAM MENGELOLA
HARTA WAKAF DI DESA SUGIHWARAS KEC. NGORO
KAB. JOMBANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 132 AS	No. REG : S-2010/AS/132
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

Oleh :

ABDUL WAHID BAGOES TIMOR ALI RAMDHAN

NIM : C01206044

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PENYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL WAHID BAGOES TAR

NIM : C01206044

Pekerjaan : Mahasiswa


Alamat : Ketawang, Sugihwaras kec. Ngoro Kab. Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul “Profesionalitas Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Sugihwaras Kec. Ngoro Kab. Jombang”
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
merupakan karya Orsinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 27 Juli 2010

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALANGAN BANGSA
TGL:
DD9A7AAF10334717
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DUE


Abd. Wahid BTAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ABDUL WAHID BAGOES TAR, NIM. C01206044** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 23 juli 2010

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. Makinuddin SH., M.Ag

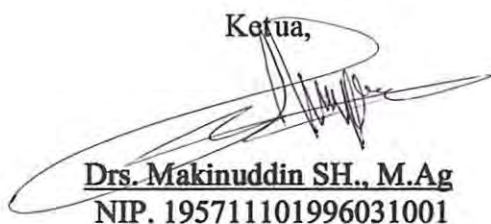
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid Bagoes TAR ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

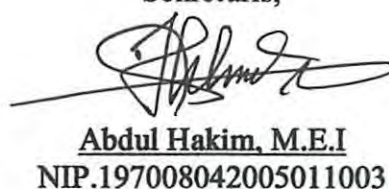
Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua,



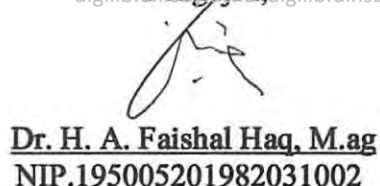
Drs. Makinuddin SH., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Sekretaris,



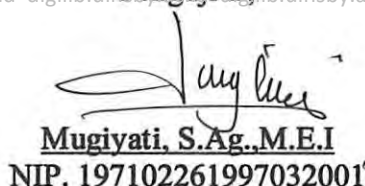
Abdul Hakim, M.E.I
NIP.197008042005011003

Penguji I,



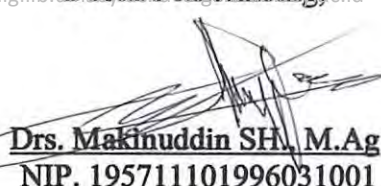
Dr. H. A. Faishal Haq, M.ag
NIP.195005201982031002

Penguji II,



Mugiyati, S.Ag..M.E.I
NIP. 197102261997032001

Dosen Pembimbing,



Drs. Makinuddin SH., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Surabaya, 04 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.19505201982031002

ABSTRAKSI

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul **“Profesionalitas Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf di desa sugihwaras kec. Ngoro kab. Jombang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana deskripsi profesionalitas *nazir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai profesionalitas *nazir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Bagaimana perspektif hukum positif mengenai profesionalitas *nazir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Guna menjawab pertanyaan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Deskripti analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf.

Dalam penelitian lapangan yang ada Desa Sugihwaras, penulis menemukan satu hal kecil yang pada umumnya masih terjadi pada Masyarakat Indonesia, yakni keluguan nazhir dalam menangani obyek wakafnya. Yang masih menjalankan perwakafan sesuai dengan metode tradisional, dimana seorang nazhir mengelola harta wakaf masih dengan cara atas dasar kepercayaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tanpa mengikatnya dengan kekuatan hukum sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang. Padahal harta wakaf yang dimiliki oleh masjid tersebut terbilang sangat banyak sekali, akan tetapi yang menjadi kendala adalah belum dilegalkannya obyek wakaf tersebut. Tidak dapat dipungkiri juga praktik pelaksanaan wakaf semacam ini pada nantinya bisa juga menyebabkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan hendaknya obyek wakaf yang ada segera disertifikatkan agar memiliki kekuatan hukum dan terhindar dari persengketaan-persengketaan yang akan terjadi nantinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	11
G. Kajian Pustaka	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>NAZHIR</i> PROFESIONAL	22
A. <i>Nazhir</i> dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian <i>Nazhir</i> menurut Hukum Islam.	22
2. Rukun-rukun Wakaf	26
3. Syarat-syarat <i>Nazhir</i>	27
4. Tugas-tugas <i>Nazhir</i>	28

B. <i>Nazhir</i> dalam Hukum Positif	29
1. Pengertian <i>Nazhir</i> dalam Hukum Positif	29
2. Syarat-syarat <i>Nazhir</i>	29
3. Tugas-tugas <i>Nazhir</i>	3
BAB III PROFESIONALITAS NAZHIR DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI DESA SUGIHWARAS. KEC. NGORO. KAB. JOMBANG	51
A. Gambaran Umum Desa Sugihwaras	51
1. Pemetaan Wilayah Secara Global	51
2. Wilayah Pemukiman	52
3. Kondisi Geografis	52
4. Kondisi Demografis	53
B. Profesionalitas <i>Nazhir</i> Wakaf di Desa Sugihwaras	61
1. Profesionalitas <i>Nazhir</i> dalam Mengelola Harta Wakaf	61
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Sugihwaras	70
BAB IV ANALISIS PROFESIONALITAS NAZHIR DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI DESA SUGIHWARAS. KEC. NGORO. KAB. JOMBANG	71
A. Profesionalitas <i>Nazhir</i> di Dusun Sugihwaras Perspektif Hukum Islam	71
B. Profesionalitas <i>Nazhir</i> di Dusun Sugihwaras Perspektif Hukum Positif	76



BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	72

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu pranata dalam Islam, wakaf telah dikenal juga dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia pada abad 13 M.¹ Sampai saat ini pengelolaan wakaf dalam penanganan dan pengelolaannya dapat dikatakan masih sangat tradisional sehingga dari segi definisi, jenis, sifat dan bentuk wakaf di Indonesia berbeda-beda menurut kajian pemahaman definisi umat Islam itu sendiri terhadap suatu peraturan perundang-undangan (hukum normatif) baik hukum syariat Islam maupun hukum positif. Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab *waqafa* (*fi'il maḍy*), *yaqifu* (*fi'il muḍari'*) dan *waqfan* (*isim maṣḍar*) yang secara etimologi (*lugah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *ḥabasa* (*fi'il maḍy*), *yaḥbisu* (*fi'il muḍari'*), dan *ḥabsan* (*isim*

¹ Departemen Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2005), hal. 1

maṣḍar) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan.² Dalam hal ini ada yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW menggunakan kata *al-ḥabs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan wakaf dalam pembahasan ini adalah *al-ḥabs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan oleh agama.³ Dalam hal ini berkaitan dengan berfirman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴

Berbuat kebajikan sebagaimana dimaksudkan firman Allah di atas, salah satunya adalah berwakaf tanah. Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu kebajikan, karena dengan perbuatan berwakaf tanah akan mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat dan umat, dan bahkan bagi Negara sekalipun. Oleh karena itulah masalah wakaf, terutama wakaf tanah, bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang

² Ahmad Warsan Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 1683

³ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 13

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya, 1985), 63

mempunyai dimensi secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan bahkan juga masalah politik.⁵

Di dalam sistem perfikihan yang ada, tidak dijumpai suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta wakaf adalah merupakan sesuatu hal yang senantiasa harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertaanya tidak sampai kepada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrar. Artinya kendati si wakif di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan / mengucapkannya kepada atau di hadapan pengelola harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah. Atau dengan kata lain meskipun tanpa adanya pengelola harta wakaf perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf yang sah.

Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat ditemui suatu kenyataan yang lain, karena apabila tanpa menyertakannya (nazhir), pelestarian wakafnya itu sendiri tidak akan dapat terjamin, dan bahkan dapat dimungkinkan tanahnya akan menjadi musnah dan terlantar keadaannya. Dengan demikian pencapaian tujuannya yang begitu suci dan mulia, serta amat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritualnya, sulit untuk dapat tercapai. Karena itu, demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak pewakaf (*wakif*), maka keberadaan

⁵ Rahmat Djatmika, H. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)*, (Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992), 2

pengelola harta (tanah) wakaf menjadi amat penting adanya di saat wakif mengikrarkan kehendaknya dalam mewakafkan tanahnya. Dan akhirnya status dan kedudukan seorang pengelola harta wakaf dalam system perfikihannya, menjadi berbeda dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek kehidupan dan pelaksanaan hukum Islam di sekitar masalah wakaf di Indonesia.

Pengelola harta wakaf dimaksud dalam istilah sistem peraturan perundang-undangnya disebutkan dengan *nazhir*. Sebutan tersebut secara penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku dalam lingkungan istilah fikih. Selain sebutan *nazhir*, banyak juga para ahli (fuqaha) yang menyebutkan dengan *mutawalli* (pengurus).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua sebutan tersebut secara etimologis berasal dari kata kerja *nazhira-yanzaru* dan *tawalla-yatawalli* dengan arti menjaga dan mengurus⁶. Sedangkan dalam terminology, diartikan sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta waqaf. Dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dirumuskannya sebagai suatu “kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda waqaf⁷, sesuai dengan kehendak pewakaf (*waqif*).

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 447 dan 507

⁷ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003), 98

tersebut⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang Hukum perwakafan pada pasal 215 ayat (5), disebutkan *Nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, dan menurut Kompilasi Hukum Islam *Nazhir* (pengelola) wakaf harus warga Negara Indonesia dan tinggal di kecamatan di tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa.⁹

Lalu dijelaskan juga pada undang-undang wakaf yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk keterangan yang lebih rinci lagi serta untuk membantu dalam hal pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di masyarakat maka dikeluarkanlah PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, yang mana tujuan dan guna dikeluarkannya PP Nomor 42 tahun 2006 ini gunanya untuk membantu dalam hal praktek dan mengaplikasikannya kepada masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam pengelolaan harta wakaf pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf itu

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 33

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), 40

bergantung dari *nazhimya*, karena peran seorang *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sangat penting sekali, akan tetapi masih banyak sekali para *nazhir* dalam pemikirannya itu masih *stagnan* (beku) terhadap persoalan wakaf, karena kebanyakan dari mereka lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Ada juga dari para *nazhir* yang tidak/masih belum mensertifikatkan tanah wakafnya terlebih hanya karena faktor ikhlas dan percaya. Hal-hal semacam inilah yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia karena masih banyak dari para *nazhir* kita yang memiliki pola pikir masih tradisional.

Realitas semacam ini, dalam lingkup yang terbatas dapat dibuktikan pada digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang, yang mana dalam mengelola harta wakaf masih berpegang teguh pada konsep *nazhir* wakaf tradisional konsumtif, karena diantara para *nazhir* yang ada di desa Sugihwaras ada yang masih belum mensertifikasi obyek wakafnya hanya karena faktor ikhlas/percaya. Dengan memperhatikan pembahasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang ada di desa Sugihwaras, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji judul penelitian mengenai **“PROFESIONALITAS NAZHIR DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

DAN HUKUM POSITIF” dengan demikian, penulis akan dapat mengetahui secara jelas tentang perkembangan profesionalitas *nazhir* yang ada di Indonesia khususnya yang berada di desa Sugihwaras.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menindaklanjuti latar belakang di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan menyangkut “Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, yakni:

1. Bagaimana deskripsi profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana perspektif hukum positif mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

5. Bagaimana profesionalitas *nazhir* dalam mengembangkan harta wakaf yang ada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

Namun yang hendak penulis jadikan rumusan masalah nantinya terkait dengan judul “Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang” nantinya adalah:

1. Bagaimana deskripsi profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana perspektif hukum positif mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

Dari rumusan masalah yang ada di atas, penulis ingin membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi salah penafsiran dan pembahasan yang akan dikaji akan lebih terfokus nantinya.

1. Dari judul “Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” ini, yang dimaksud dengan “Profesionalitas *Nazhir*” penulis hanya akan membatasi keprofesionalitasan seorang *nazhir*

dari sudut managerialnya saja, yakni dalam hal sertifikasi wakaf, karena hingga saat ini realitanya masih sangat banyak *nazhir* yang menegesampingkan hal tersebut, sehingga seakan-akan meremehkan dampak-dampak yang akan terjadi nantinya, khususnya *nazhir* yang berada di wilayah pedesaan seperti yang terjadi di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang.

2. Dan dalam menganalisis permasalahan yang akan diangkat nantinya penulis hanya akan menganalisisnya bagaimana kriteria *nazhir* wakaf di desa Sugihwaras dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif mulai dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, maka yang hendak dicarikan jawabanya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

3. Bagaimana perspektif hukum positif mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui data tentang profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang.
2. Mengetahui data tentang profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang apakah sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam.
3. Mengetahui data tentang profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf yang berada di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang apakah sudah sesuai dengan perspektif Hukum Positif.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf, serta dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

F. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul “Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang”, maka untuk mnghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

1. **Profesionalitas** : Kepiawaian seseorang dan ahli dalam menangani bidangnya.

2. **Nazhir** : Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁰
3. **Wakaf** : ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh Agama.¹¹
4. **Hukum Islam** : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, berlaku mengikat bagi semua umat Islam)¹².
5. **Hukum Positif** : Suatu rangkaian ugeran/Peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.¹³
6. **Sugihwaras** : Salah satu nama Dukuh yang berada di Desa Sugihwaras.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan

¹⁰ Depag RI, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 5

¹¹ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1008

¹² Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 13

oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan. Adapun permasalahan dengan topik yang sama mengenai profesionalisasi *Nazhir* pernah dibahas oleh: Elly Husnaningsih, 2007, *Profesionalisasi Nazhir Menuju Wakaf Produktif (Studi Hukum Islam Tentang wakaf Tanah Pasar Paing di Rungkut Kidul Surabaya)*. Skripsi ini menyimpulkan beberapa hal penting, mengenai:

1. Sejauh mana Profesionalisi *Nazhir* wakaf Tanah pasar paing di Rungkut Kidul Surabaya.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Tanah wakaf tersebut.
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam Terhadap Profesionalisasi *Nazhir* Wakaf Tanah Pasar Paing di Rungkut Kidul Surabaya.

Sedangkan topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Untuk mewujudkan karya ilmiah (skripsi) ini, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang gambaran umum desa Sugihwaras.
- b. Data tentang tata cara pengelolaan harta wakaf di desa Sugihwaras.
- c. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalitas seorang *nazhir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras.
- d. Dampak pengelolaan harta wakaf secara profesional oleh seorang *nazhir* di desa Sugihwaras.
- e. Data tentang para *nazhir* yang ada di desa Sugihwaras.

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini keterangan hasil wawancara dengan :

- a. Perangkat Desa Sugihwaras.
- b. Kyai atau tokoh masyarakat Sugihwaras.
- c. Para *nazhir* yang ada di desa Sugihwaras.
- d. Pihak-pihak yang dianggap representatif, kapabel dan mengetahui pengelolaan wakaf di Desa Sugihwaras.

Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya :

- a. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. PP No. 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41.
- c. PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah.
- d. Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*
- e. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- f. Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*
- g. Sayid Sabiq, *Figh al-Sunnah*.
- h. Imam Muslim, *Shahih Muslim*.
- i. Depag RI, *Peraturan Perwakafan, (Waqf Regulation)*.
- j. Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*.
- k. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*
- l. Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- m. Kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

3. Populasi

Populasi

Populasi adalah penduduk yang berada di Desa Sugihwaras. Populasi dalam penelitian ini, para tokoh masyarakat, tokoh Agama dan juga seluruh *nazhir* di Desa Sugihwara kecamatan Ngoro kabupaten Jombang sebanyak 3 *nazhir* yang ada di Desa Sugihwaras kecamatan ngoro kabupaten Jombang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses penggandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.¹⁴ Metode pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara keseluruhan dan setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan verifikasi.¹⁵

Metode pengumpulan dapat dibagi menjadi tiga komponen yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan metode pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara secara mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Observasi* (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan dengan observasi yaitu pengamatan langsung dapat diperoleh data secara obyektif, baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal maupun yang dapat berkomunikasi secara verbal, observasi merupakan pendekatan untuk melakukan pengukuran, observasi atau pengamatan dalam hal ini yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang tidak perlu mengajukan

¹⁴ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 74

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 128



pertanyaan,¹⁶ peneliti mengadakan pengamatan terhadap makna-makna atau simbol-simbol serta peristiwa yang terdapat pada obyek penelitian.

Adapun pengamatan yang digunakan terhadap profesionalitas *nazir* dalam mengelola harta wakaf di desa Sugihwaras adalah pengamatan tersembunyi dan terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan situasi yang kondusif dari data yang diperoleh agar data tersebut valid dan realistis.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang di lakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, dengan tujuan:

- 1) Secara umum adalah untuk mengetahui informasi secara mendalam di dalam penanganan subyek yang diteliti, yaitu tentang profesionalitas *nazhir* yang berada di desa Sugihwaras.
- 2) Secara khusus adalah untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, kesadaran, motivasi, tuntutan, pengaruh dan kepedihan, penelitian ini sebagai pengecekan terhadap aktor sebagai obyek penelitian

Sedangkan objek yang diwawancarai sebagai informan dalam hal ini, adalah *Nazhir*, Perangkat Desa, dan pihak-pihak yang dianggap

¹⁶ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rasda Karya, 2000), 64

representatif, kapabel dan mengetahui akan perkembangan pengelolaan harta wakaf oleh *nazhir* di Desa Sugihwaras.

c. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu studi yang menggunakan penelitian dari dokumen-dokumen yang telah ada dari pembukuan para *nazhir*, agar dapat memperoleh data secara maksimal ditambah lagi menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis, oleh karena itu penelitian/penulisan ini berupa penelitian lapangan dan kepustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis dalam menganalisis data baik yang diperoleh dari hasil penelitian maupun telaah literatur adalah deskriptif-analisis dengan pola pikir induktif yaitu sebagai berikut:

- a. Deskriptif: yaitu metode yang bertujuan untuk deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang didapatkan.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian terkait dengan Profesionalitas *Nazhir* di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

¹⁷ Moh. Nazhir, *Metode...*, 63

- b. Induktif : yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang khusus kemudian di tarik ke generalisasi yang bersifat umum.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya Profesionalitas *Nazhir* di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang sifatnya khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu Profesionalitas *Nazhir* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih mengarah, maka skripsi ini penulis sistematisir menjadi lima bab. Di mana penyusunan antara bab yang satu dengan yang lainnya dilakukan secara sistematis dan logis.

Adapun lima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Dalam Bab I Pendahuluan, bab ini yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Selanjutnya dalam BAB II merupakan Tinjauan teoritis yang akan menerangkan tentang Tinjauan umum tentang *nazhir* profesional

¹⁸ Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 41

yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengertian *nazhir* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif juga apa saja yang menjadi syarat dan juga tugas-tugasnya.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian terhadap profesionalitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu mengenai gambaran umum desa Sugihwaras, yang meliputi pemetaan wilayah secara global, wilayah pemukiman, kondisi geografis, kondisi demografis, struktur pemerintahan Desa Sugihwaras, keadaan sosial ekonomi yang meliputi: bidang ekonomi, bidang pendidikan, kondisi agama. Kedua, Profesionalitas *Nazhir* Wakaf di Desa Sugihwaras. yang berisi tentang profesionalitas *Nazhir* dalam mengelola harta wakaf serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan harta wakaf di desa Sugihwaras kecamatan Ngoro kabupaten Jombang.

BAB IV : Bab ini berisi tentang Analisis terhadap Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf di Desa Sugihwaras yang berisi tentang: Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf di Desa Sugihwaras, faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola harta wakaf, dan Profesionalitas *Nazhir* dalam

Mengelola Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

BAB V : Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *NAZHIR* PROFESIONAL

A. *Nazhir* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Nazhir* Menurut Hukum Islam

Nazhir unsur penting dalam perwakafan, meskipun ulama fiqh tidak menyebutnya termasuk salah satu rukun wakaf. Tanpa *nazhir*, harta wakaf tidak dapat terjaga kelestariannya dan tidak dapat dikembangkan apalagi untuk diambil manfaatnya. Artinya, tujuan wakaf dapat tercapai jika ada *nazhir* yang mampu melestarikan harta pokok wakaf, mengembangkannya dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukannya.¹

Nazhir wakaf yaitu orang yang memiliki wewenang untuk mengurus, menjaga, merawat, mengatur dan melakukan seluruh upaya yang berhubungan dengan kemaslahatan.² *Nazhir* wakaf tidak harus satu orang, namun boleh dua, tiga atau bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan.³ Dalam artian apabila yang dikelola sangat besar seperti sebuah pesantren maka tidak mungkin yang akan mengelolanya (*nazhir* hanya satu atau dua orang).

Nazhir ada dua macam, yaitu:

¹ Emy Chulaimi, Tesis, *Wakaf Perspektif Hukum Nasional, Profesionalisme Nazir*, (Jombang, 2001), 54

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 456

³ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab*, (Kediri: Al-Falah, 2009), 88

- a. *Nazhir 'ām* : penguasa daerah setempat.
- b. *Nazhir khos* : orang yang diangkat untuk mengurus wakaf.

Ulama' *Mazahib Al Arba'ah* sepakat bahwa ketika dalam praktek perwakafan *wakif* mengangkat orang lain atau dirinya sendiri sebagai pengurus harta wakaf, maka bagi orang lain yang tidak ditugasi oleh *wakif* tidak diperkenankan turut campur tangan dalam mengurus harta tersebut. Namun ketika dalam praktek perwakafan *wakif* tidak menugaskan siapapun untuk mengurus wakaf, maka para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan *nazhir* dari harta wakaf tersebut.

a. Menurut Imam Hanafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Hanafi, ketika dalam praktek perwakafan *wakif* tidak menugaskan seorang pun untuk mengurus wakaf, maka yang bertugas menjadi *nazhir* adalah *wakif* sendiri, ketika *wakif* ada halangan atau telah meninggal dunia, predikat *nazhir* berpindah pada orang yang diwasiati, namun ketika tidak ada yang diwasiati, maka yang menjadi *nazhir* adalah *nazhir am*, yaitu penguasa setempat.

b. Menurut Imam Syafi'i

Imam syafi'i berpendapat, ketika dalam praktek perwakafan wakif tidak menugaskan seorangpun untuk mengurus perwakafan, maka secara otomatis *nazhimya* adalah *nazhir 'ām*, yaitu *nazhir* setempat.⁴

Dan dalam kepengurusan wakaf *nazhir* juga dibantu oleh seseorang yang disebut dengan *qoyyim*. *Nazhir* adalah orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf. Sedangkan *qoyyim* adalah pekerja lapangan yang bertugas membantu *nazhir* dalam menjaga, serta merawat harta wakaf.

c. Menurut Imam Malik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Malik, ketika dalam praktek perwakafan wakif tidak menugaskan seorangpun untuk mengurus perwakafan, maka secara otomatis *nazhimya* adalah *nazhir 'ām*, yaitu *nazhir* setempat.⁵ Dengan catatan bahwa pengelola harta wakaf tersebut mengelola harta wakaf tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yakni demi kemaslahatan umat. Karena Imam Malik juga memiliki teori hukum yang dinamakan *Al Maṣlahah Al Mursalah* yang dapat diterjemahkan “Hukum Untuk Kepentingan Umum”, selanjutnya digunakan istilah *Al Maṣlahah*. Menurut Imam Malik kepentingan atau kemashlahatan umum adalah

233 ⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Juz VIII, (Damaskus: Darul Fikr, 1985),

⁵ *Ibid...*, 154

salah satu dari sumber-sumber syari'ah.⁶ Oleh karenanya bagi Maliki, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya, yang menjadi dasar Mazhab Maliki kepemilikan harta wakaf itu tetap berada di tangan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan manfaat bagi *maukuf 'alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf).

d. Menurut Imam Hambali

Menurut Imam Hambali, ketika dalam praktek perwakafan *wakif* tidak menugaskan seorang pun untuk mengurus wakaf, maka yang bertugas menjadi *nazhir* adalah *Maukuf 'alaih* (sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf), dan jika *Maukuf 'alailmya* lebih dari satu, maka setiap individu dari mereka mempunyai hak yang sama dalam mengurus wakaf tersebut.⁷

Dalam kaitan pengelolaan harta wakaf, menurut Ibnu Hajar Al-haytami kepengurusan wakaf ada dua macam: *nazhir* dan *qoyyim*. *Nazhir* adalah orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf. Sedangkan *qoyyim* adalah pekerja lapangan yang bertugas membantu *nazhir* dalam menjaga, serta merawat harta wakaf.

Penentuan orang yang bertugas sebagai *nazhir* dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh *wakif*, artinya *wakif* mempunyai hak untuk menunjuk siapa yang akan mengurus harta yang diwakafkan. Apabila *wakif*

⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 28

⁷ Mannan, *Fiqh...*, 89

tidak menunjuk seseorang yang bertugas sebagai *nazhir*, maka tokoh masyarakat (*sulaha'ul balad*) wajib menunjuk seseorang yang bertugas sebagai *nazhir*, jika tidak maka ia berdosa. *Nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif* atau dibentuk oleh tokoh masyarakat dapat terdiri dari beberapa orang yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua yang memiliki tanggung jawab penuh atas tugas-tugas *nazhir*.

2. Rukun-rukun Wakaf

Dalam lembaga wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan Rukun-rukun yang terdapat dalam perwakafan, yakni:

- 1) *Wakif*, yang dimaksud dengan wakif adalah orang yang mewakafkan.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 •Dan seorang wakif disyaratkan adalah orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya.
- 2) *Maukuf*, (barang/benda yang diwakafkan).
- 3) *Maukuf 'Alaih*, (Individu atau kelompok penerima wakaf).
- 4) *Şigat*. Pemberi wakaf tentang harta yang diwakafkan dan peruntukannya serta disaksikan paling kurang oleh dua orang saksi. Keempat hal ini dalam kitab *fiqh* disebut sebagai rukun wakaf. Dalam perkembangan terakhir, diluar keempat rukun tersebut, lahir rukun kelima.
- 5) *Nazhir*, (Pengelola harta wakaf). Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf kepada masyarakat dan pemerintah. Adanya

pengelola yang bertanggung jawab adalah agar terlaksanannya asas keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.⁸

Dan juga di dalam buku Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia karangan Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag dijelaskan bahwasanya *mauquf alaih* bisa juga merupakan nazhir yang ditunjuk oleh wakif, karena selain merupakan tujuan wakaf, *mauquf alaih* merupakan orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf.

3. Syarat-syarat *Nazhir*

Pejabat *nazhir* yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Islam

Yakni, yang menjadi *nazhir* haruslah seseorang yang beragama Islam, akan tetapi menurut Imam Hanafi, Islam bukan merupakan syarat bagi seorang *nazhir*, jika *Mauquf 'Alaihnya* orang kafir.⁹

b. *Al-'adālah*

Al-'adālah (sifat adil) merupakan karakter mulia yang dimiliki seseorang yang bisa mendorong pemiliknya untuk melaksanakan segala perintah syara' dan menjauhi segala larangan syara'.

Menurut mayoritas ulama', salah satu syarat *nazhir* harus memiliki sifat *'adālah* karena kaitannya dalam hal ini adalah *wilāyah* (kekuasaan).

⁸ Rifyal ka'bah, *Penegakan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 92

⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam...*, 155

Namun menurut Imam Hambali, seorang nazir tidak disyaratkan harus *'adalah*.¹⁰

c. *Al-kifāyah wal ihtida' ilat taṣarruf*

Yakni, memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf, dalam menjadi *nazhir* disyaratkan pula harus dari orang yang sudah *balig* dan juga berakal, meskipun dia seorang perempuan.¹¹

4. Tugas-tugas *Nazhir*

Secara umum tugas *nazhir* adalah bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, perawatan dan pengembangan harta wakaf. Semua kebijakan yang diambil oleh *nazhir* harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang kembali kepada umat. Penggunaan harta wakaf harus didasarkan kepentingan umat dan Agama.¹²

Adapun tugas-tugas seorang *nazhir* adalah:

- a. Menjaga barang-barang wakafan
- b. Merawat barang wakafan
- c. Menyewakan barang wakafan
- d. Menanami barang wakafan
- e. Membagi hasil barang wakafan
- f. Melakukan semua upaya yang maslahat bagi barang wakafan

¹⁰ *Ibid...*, 155

¹¹ Mannan, *Fiqh...*, 91

¹² Muhibbul Aman Aly, "Wakaf, Masjid, Pondok dan Madrasah", dalam <http://www.artikelkeislaman.com>

B. *Nazhir* dalam Hukum Positif

1. Pengertian *Nazhir* menurut Hukum Positif

Dalam berwakaf aspek penting lainnya ialah aspek pengelolaan, khususnya pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf disebut dengan istilah “*nazhir*”. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Syarat-syarat *Nazhir*

Peran *nazhir* adalah top manajer yang menentukan, mengendalikan manajerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakaf mengatur masalah ini dalam pasal 9-14 dan pasal 42-46. *Nazhir* meliputi:¹³

Pasal 9

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum.

Pasal 10

Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 402

Organisasi hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus *nazhir* yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Badan hukum hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 9, *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Tugasnya, mengelola dan

mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya, yaitu berkenaan

dengan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tugas *Nazhir* yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ini membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan peruntukan wakaf. Dalam hal pengadministrasian menuntut kecakapan hukum dari seorang *nazhir*, tugas pengelolaan dan pengembangan menuntut ketrampilan (skill) dan kemampuan manajerial *Nazhir* untuk mencapai tujuan wakaf, sedangkan pengawasan dan pelaporan menuntut kemampuan audit dari

seorang *Nazhir* agar dapat menghitung dan mengkalkulasi hasil pengelolaan harta wakaf.

Untuk memenuhi tujuan wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi dan sosial, UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 10, mensyaratkan *Nazhir* harus memenuhi enam syarat, diantaranya amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Syarat *Nazhir* seperti ini bukan sesuatu yang sulit untuk didapat, sebab sekarang ini telah banyak lembaga profesi dan pendidikan yang berwawasan syari'ah menyediakan sumber daya manusia yang terampil sehingga mampu mengembangkan perwakafan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas-tugas *Nazhir*

Adapun tugas-tugas *nazhir* yang telah ditentukan oleh Undang-undang adalah:

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, *Nazhir* harus terdaftar pada Mentri dan Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Adalah:

Pasal 2

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum.

Pasal 3

- 1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *Nazhir* untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama *Nazhir* tidak membuktikan kepemilikan *Nazhir* atas harta benda wakaf.
- 3) Penggantian *Nazhir* tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua ***Nazir* Perseorangan**

Pasal 4

- 1) *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.

- 2) *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran *Nazhir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/ kota.
- 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nazhir*.
- 5) *Nazir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah seorang *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- 1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh BWI.
- 2) Berhentinya salah seorang *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya *Nazhir* perseorangan lainnya.

Pasal 6

- 1) Apabila diantara *Nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka *Nazhir* yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya *Nazhir* perseorangan, yang kemudian pengganti *Nazhir* tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
- 2) Dalam hal diantara *Nazhir* perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka *Nazhir* yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
- 3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *Nazhir* melalui Kantor

Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi / kabupaten / kota.

- 4) Apabila *Nazhir* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *Nazhir*.

Bagian Ketiga
Nazir Organisasi
Pasal 7

- 1) *Nazhir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *Nazhir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- 3) *Nazhir* organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan;
 - b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten/kota letak benda wakaf berada;
 - c. Memiliki:
 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 2. Daftar susunan pengurus;
 3. Anggaran rumah tangga;
 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW.

Pasal 8

- 1) *Nazhir* organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.
- 2) Apabila salah seorang *Nazhir* yang diangkat oleh *Nazhir* organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai *Nazhir*, maka *Nazhir* yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

- 1) *Nazhir* perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.
- 2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka *Nazhir* organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak *kenazhirannya* oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.
- 3) Apabila *Nazhir* organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *Nazhir*.

Pasal 10

Apabila salah seorang *Nazhir* yang diangkat oleh *Nazhir* organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai *Nazhir* yang diangkat oleh *Nazhir* organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat

Nazir Badan Hukum

Pasal 11

- 1) *Nazhir* badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran *Nazhir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/ kabupaten / kota.
- 3) *Nazhir* badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
 - b. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan;
 - c. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
 - d. Memiliki:
 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. Daftar susunan pengurus;
 3. Anggaran rumah tangga;
 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- 1) *Nazhir* perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.
- 2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka *Nazhir* badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak *kenazhirannya* oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

- 3) Apabila *Nazhir* badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *Nazhir*.

Bagian Kelima
Tugas dan Masa Bakti *Nazir*
Pasal 13

- 1) *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) *Nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- 1) Masa bakti *Nazhir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 2) Pengangkatan kembali *Nazhir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Semua syarat dan tugas bagi *nazhir* secara administrasi telah diatur di dalam UU No 41 tahun 2004. Akan tetapi perwakafan di Indonesia masih sangat sulit berkembang. Salah satu faktor yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan *nazhir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan *nazhir* dipengaruhi, diantaranya:

- a. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakkan

sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya pemahaman, mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun. Dari sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bias dikembangkan secara lebih optimal.

- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nazhir* wakaf. Banyak juga para *wakif* yang menyerahkan harta benda wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh Agama seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai).¹⁴
- c. Lemahnya kemauan para *nazhir* wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak *nazhir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan wakaf.

¹⁴ Achmad Djunaidi dan Thoebieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi, 2006), 53

Padahal, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bias dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama' sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazhir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum) pengangkatan *nazhir* wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan, sedemikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.¹⁵

Seorang *nazhir* wakaf memiliki posisi yang sangat urgent dalam perwakafan, karena *nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf, *nazhir* juga merupakan instrument penting dalam perwakafan. Oleh karena itu setidaknya seorang *nazhir* harus memenuhi beberapa asas,¹⁶ yakni:

¹⁵ *Ibid...*, 54

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetya, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 261

- a. Asas Pertanggung Jawaban, dan
- b. Asas Manajerial.

Rasa tanggung jawab merupakan salah unsur yang penting yang harus dimiliki oleh setiap *nazhir*, karena dia harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya jika dia melakukan suatu kesalahan, dan sikap ini merupakan salah satu sikap yang telah diajarkan oleh Rasul kepada umatnya.

Selain memiliki rasa tanggung jawab, seorang *nazhir* juga harus memiliki kemampuan secara manajerial, melihat semakin berkembangnya harta yang bisa diwakafkan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id buruk. Kalau pengelolaan harta benda wakaf selama ini hanya dikelola apa adanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional.

- a. Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah¹⁷, wakaf harus dipertanggung jawabkan baik didunia maupun di akhirat

¹⁷ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 37

kelak. Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

- 1) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan-Nya. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Bagi *wakif* (pihak yang berwakaf) mengharapkan aliran pahala yang tiada henti-hentinya atas amal sosial berupa sedekah jariyyah yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. Bagi *nazhir*, memiliki beban amanah yang tidak ringan karena disamping mewujudkan niat para *wakif*, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga dipertanggung jawabkan secara vertikal baik sebagai pribadi maupun kelompok (*nazhir*). Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggung jawaban:

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣)

Artinya : *“Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban mereka dan beberapa beban beserta pikulan-pikulan mereka dan mereka akan ditanyai perihal dusta yang mereka ada-adakan. (QS. Al-Ankabut: 13).¹⁸*

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, 398

Pertanggung jawaban kepada Allah SWT ini mendasari seluruh pertanggung jawaban berikutnya. Sehingga jika seseorang sudah memiliki tanggung jawab kepada Allah, dalam posisi apapun, maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Dan keikhlasan bagi setiap posisi memiliki porsi sendiri-sendiri. Bagi seorang *wakif*, dia akan merasa sangat lepas tanpa pengharapan yang bersifat duniawi atas perbuatan yang dilakukannya. Sementara bagi seorang *nazhir*, apa yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, berkualitas dan didasari pada niatan yang tulus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi *kenazhiran*. Lembaga *kenazhiran* yang terdiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.

Oleh karena itu, sudah saatnya *nazhir* wakaf berbentuk kelembagaan (organisasi) resmi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam rangka

memaksimalkan potensi-potensi perwakafan. Terdapat pada Pasal 10 ayat (2) bahwa organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dengan pengoptimalan fungsi organisasi, harta benda wakaf dapat diberdayakan secara produktif, lebih mudah memenuhi keinginan *wakif* dan lebih mudah menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu.

- 3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang *nazhir* atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanggung jawaban secara hukum memang memiliki aspek yang sangat luas, tidak terbatas pada hukum positif yang selama ini ada, tapi juga hukum syari'at yang secara khusus mengatur tentang

perwakafan. Sehingga dengan demikian, ibadah wakaf yang sifatnya amal sosial, tetapi tetap memiliki kerangka dan landasan hukum yang sangat jelas. Dengan adanya payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses pengelolaan wakaf dapat dijadikan rujukan demi terlaksananya amal-amal kebajikan.

- 4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang (*nazhir* wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggung jawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Karena apabila melakukan perbuatan yang tercela, yang bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat dengan dibeberkan dan dipergunjingkan keburukannya. Selain para pihak yang terkait dengan wakaf bisa bertanggung jawab dengan perilakunya sehari-hari. Pertanggung jawaban sosial itu identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, yaitu membudayakan rasa malu. Sejalan dengan itu dalam hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa iman itu mempunyai enam puluh cabang, sedang malu itu merupakan salah satu cabang dari pada iman. Rasa

malu dalam pribadi seseorang akan dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosialnya.¹⁹

b. Asas Profesionalitas Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan harta benda wakaf selama ini hanya dikelola apa adanya dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional.²⁰

Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu termasuk masalah yang terkait dengan manajemen, jika dilakukan dengan mengikuti empat sifat minimal yang dimiliki oleh Nabi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. Hanya saja dalam ukuran manajemen modern mengalami penafsiran dan pelebaran makna yang lebih spesifik.²¹ Namun jika diruntut dalam sebuah kerangka teori yang utuh hanya mengerucut pada empat hal tersebut, yaitu:

¹⁹ *Ibid...*, 263

²⁰ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 67

²¹ Daut Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988),

1) Amanah (dapat dipercaya), secara garis umum pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik *input* atau *outputnya*. *Input* dalam sebuah pengelolaan bisa dilihat dari sumber daya manusia (SDM) nya, dalam hal wakaf adalah pihak *nazhir*, yaitu:

a) Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang unggul, sehingga *nazhir* ini nantinya tahu apa yang hendaknya ia lakukan terkait tugas dan kewajiban seorang *nazhir* nantinya, khususnya dalam hal administratif.

b) Memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain.

c) Adanya pembagian kerja yang jelas, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab.

d) Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan manajemen.

2) *Siddiq* (jujur), disamping amanah (dapat dipercaya), *siddiq* (jujur) adalah sifat mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDMnya maupun bentuk program yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak. Bentuk

program atau produk yang dipasarkan harus diinformasikan secara benar.

- 3) *Faṭānah* (cerdas/brilliant). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk (program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju. Produk yang ditawarkan memberikan kesempatan-kesempatan yang sangat dinantikan oleh konsumen atau pihak-pihak yang terkait dengannya.

- 4) *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Sebenarnya konsep *tabligh* ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik dan benar. Dalam manajemen penyebar luasan informasi yang baik dan jujur sangat terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah produk harus disampaikan secara jujur, tidak menipu atau membodohi masyarakat. Strategi pemasaran yang diterapkan harus mengikuti kaidah-kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atau keresahan yang tidak perlu. Dari segi pelaporan keuangan, manajemen profesional itu harus dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab, sehingga pihak yang mengatur seluruh aliran

uang (bagian keuangan) siap untuk diaudit oleh pihak manapun dan kapanpun juga.²²

Wakaf berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa fuqoha terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi sang wakif.

Dan meski para fuqoha' tidak memasukan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, akan tetapi para fuqoha' mengharuskan wakif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf.²³

Di Indonesia, *Nazhir* wakaf dapat ditunjuk oleh wakif yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah. Sebagaimana Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak secara eksplisit menjelaskan siapa yang mengangkat nazhir wakaf. Akan tetapi disitu disebutkan bahwasanya Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, pasal 6 ayat 4 dijelaskan, bahwa

²² Muchsin, *Lembaga Wakaf Potensial dalam Mengembangkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: IKAHI, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XX No. 238, 2005), 48

²³ Abied, "menyulap aset wakaf menjadi produktif", dalam <http://meetabied.wordpress.com>

Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akte Ikrar Wakaf (AIW) dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian *nazhir*. Pasal 6 ini menunjukkan bahwa penunjukan nazhir dapat diusulkan oleh wakif, baik dalam penunjukan awal saat pendaftaran akte ikrar wakaf maupun pada saat Nazhir tidak lagi memenuhi kewajibannya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Dalam UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 9, *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Tugasnya, mengelola dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya, yaitu berkenaan dengan melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas *Nazhir* yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ini membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan peruntukan wakaf. Dalam hal pengadministrasian menuntut kecakapan hukum dari seorang nazhir, tugas pengelolaan dan pengembangan menuntut ketrampilan (skill) dan kemampuan manajerial Nazhir untuk mencapai tujuan wakaf, sedangkan

pengawasan dan pelaporan menuntut kemampuan audit dari seorang *Nazhir* agar dapat menghitung dan mengkalkulasi hasil pengelolaan harta wakaf.

Untuk memenuhi tujuan wakaf yang berdimensi ibadah, ekonomi dan sosial, UU Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 10, mensyarkan *Nazhir* harus memenuhi enam syarat, di antaranya amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

BAB III

PROFESIONALITAS *NAZHIR* DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Desa Sugihwaras

1. Pemetaan Wilayah Secara Global

Secara garis besar wilayah desa Sugihwaras terdiri dari beberapa bagian. Diantaranya adalah; *Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (Musholla, masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), ada juga pertokoan dengan rumah penduduk atau berada di dalam rumah tersebut, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan, perternakan dan lain-lain. *Ketiga*, wilayah pemakaman penduduk, adapun pemakaman ini dibagi menjadi empat tempat yang ada di beberapa dusun, yaitu pemakaman yang terletak di dusun Sugihwaras untuk warga dukuh Sugihwaras dan Pojok, pemakaman yang terletak di Ketawang yang diperuntukkan untuk warga dusun Ketawang dan Kalak, serta pemakaman dusun Cermen bagi warga dusun Cermen dan pemakaman dusun Gandan untuk warga Gandan.

2. Wilayah Pemukiman

Secara garis besar wilayah pemukiman desa Sugihwaras yaitu sebagai berikut: wilayah pemukiman yang berdekatan dengan persawahan warga, menjadikan desa Sugihwaras sebagai tempat yang tentram, mashur dan bersahabat serta sejuk, dengan demikian wilayah desa Sugihwaras masih sangat luas, tidak padat pemukiman dan penduduk.

3. Kondisi Geografis

Desa Sugihwaras merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang mempunyai luas wilayah 309, 200 Ha. Desa Sugihwaras di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Balongpanggang. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Nggebang
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bareng
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Tamanan
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kanigoro

Adapun Dusun-dusun yang terletak di Desa Brangkal adalah :

- a. Dusun Sugihwaras terletak di sebelah Barat
- b. Dusun Ketawang terletak di sebelah Timur
- c. Dusun Pojok terletak di sebelah Utara
- d. Dusun kalak terletak di sebelah Barat setelah Dusun Ketawang.

- e. Dusun Gandan terletak di sebelah Selatan
- f. Dusun Cermenan terletak di sebelah Barat setelah Dusun Kalak.

Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya di Desa Sugihwaras adalah saling berdekatan dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Ditinjau dari segi geografis Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang merupakan desa yang berjauhan dengan Ibu Kota Kecamatan serta terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, atau tepatnya sebelah barat Ibu Kota Kecamatan, dan sebelah Utara ibukota kabupaten.

4. Kondisi Demografis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data statistik Kecamatan Ngoro tahun 2010 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sugihwaras secara keseluruhan berjumlah 3735 jiwa/orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut :

TABEL 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	1795	
2.	Perempuan	1940	
Jumlah keseluruhan		3735	

b. Struktur Pemerintahan Desa Sugihwaras

Desa Sugihwaras dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa serta dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu seorang sekretaris desa dan 10 orang perangkat desa lainnya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparat desa selalu bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa yang terdiri 7 orang.

Adapun struktur pemerintahan Desa Brangkal adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Moh. Zen

Sekretaris Desa : Joko Prasetyo

Kaur Pemerintahan : Asmu'i

Kaur Umum : Sutrisno

Kaur Pembangunan : Sutari

Kaur Kesra : Shorimuddin

Kaur Keuangan : Mashudi

Kasun Sugihwaras : Sadi

Kasun Pojok : Ismail

Kasun Ketawang : Achmad Agus Santoso

Kasun Kalak : Bambang Budi Santosa

Kasun Gandan : Suyono

Kasun Cermenan : Suriyadi

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam melaksanakan pembangunan. Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah Desa Brangkal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Bidang Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. Masyarakat Desa Sugihwaras secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar adalah sebagai petani karena Desa tersebut memiliki area bertani yang cukup luas. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk Desa Sugihwaras menurut mata pencaharian:

TABEL 3.2

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian¹

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	482	
2	Buruh tani	673	
3	Buruh/swasta	325	
4	Pegawai negri	28	
5	Pengrajin	19	
6	Pedagang	419	
7	Peternak	195	
8	Nelayan	-	
9	Montir	4	
10	Dokter	-	
11	Bidan	1	
Jumlah keseluruhan		2146	

Dari data statistik yang ada di atas menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah pertanian (sebagai petani, baik petani sendiri dan ada juga yang menjadi buruh tani). Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar tanah Desa Sugihwaras adalah tanah pertanian dari hasil tanaman daerah tersebut kebanyakan ditumbuhi kangkung, jagung, tebu, kacang-kacangan dan padi. Oleh karena itu, kebanyakan penghasilan mereka itu dari pertanian dan berdagang, sedangkan pertanian merupakan modal

¹ Monografi Desa Sugihwaras Tahun 2010

utama mata pencaharian mereka. Dan produktifitas di Desa Sugihwaras terhitung sangat baik dan normal, meskipun saat Musim kemarau datang, dikarenakan sawah-sawah penduduk sangat dekat sekali dengan sungai kembar yang menjadi perbatasan Dusun tamanan, yang mana sumber air tersebut langsung dari sumber air yang ada di daerah pegunungan Wonosalam.

2) Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia.

Melalui pendidikan akan merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu merubah nilai-nilai yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan warga Desa Sugihwaras.

TABEL 3.3

Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan²

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	205	
2	SDN	555	
3	SLTP	443	
4	SLTA	107	
5	Akademi/D1-D3	3	
6	Sarjana	39	
Jumlah keseluruhan		1352	

² Monografi Desa Sugihwaras Tahun 2010

Untuk melaksanakan pendidikan, sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sugihwaras dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena pendidikan merupakan faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, dan berwawasan luas. Dengan demikian masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Desa Sugihwaras terdapat beberapa lembaga pendidikan formal maun non formal.

a) Pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK) dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekolah Dasar Negeri (SDN)

b) Pendidikan non formal keagamaan hampir terdapat di setiap Dusun di Desa Sugihwaras yang berbentuk Taman Pendidikan Qur'an (TPQ).

3) Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula bagi penduduk Desa Sugihwaras kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari pola hidup sehari-hari dimana untuk menunjang kegiatan hidup sehari-hari diperlukan kesehatan yang optimal. Dengan kesehatan yang optimal diharapkan proses pembangunan yang sedang berjalan

benar-benar terwujud sehingga penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercapai selain peningkatan efisiensi kerja. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Terdapat empat posyandu yang tersebar pada masing-masing dusun. Kegiatan yang dilakukan antara lain imunisasi balita, pelayanan KB, pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan balita, perbaikan gizi balita dengan memberikan tambahan makanan bergizi, dan kegiatan-kegiatan lain yang diutamakan untuk kesehatan ibu dan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b) Penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang sering, pernah dan intensif dilakukan adalah penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, penyuluhan mengenai hidup sehat, dan penyuluhan pencegahan demam berdarah yang biasanya setelah penyuluhan dilanjutkan dengan penyemprotan asap (*fogging*).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Sugihwaras belum cukup memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat Desa Sugihwaras. Walaupun ada satu buah sarana kesehatan di Desa tersebut, tetapi belum cukup kepada kebutuhan kesehatan masyarakat Desa Sugihwaras.

4) Kondisi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi Desa Brangkal pada tahun 2010, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini

TABEL 3.4

Keadaan Penduduk Menurut Agama³

No	Nama Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	3733	
2	Kristen	2	
3	Katholik	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
6	Penganut kepercayaan lain	-	
Jumlah keseluruhan		3735	

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Brangkal hampir keseluruhannya adalah pemeluk Agama Islam, pemeluk selain Agama Islam sangatlah kecil dan dapat dihitung dengan jari.

³ Monografi Desa Sugihwaras Tahun 2010

B. Profesionalitas *Nazhir* Wakaf di Desa Sugihwaras

1. Profesionalitas *Nazhir* dalam Mengelola Harta Wakaf

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf itu sendiri. Lalu istilah *nazhir* berkembang lagi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang RI No 41 juga disebutkan bahwasannya *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Istilah *nazhir* identik kepada seorang pengelola atau pengurus sebuah masjid yang lebih populer dengan sebutan Ta'mir masjid, dan masjid sendiripun berfungsi sebagai tempat ibadah shalat dan tempat mengayomi dan membina umat sekitarnya secara aktif.

Dengan luasnya fungsi dan tugas masjid, tidak mungkin pengelolaan masjid dilaksanakan oleh satu orang. Sebab, bila masih dilakukan oleh perorangan atau sekelompok kecil, maka masjid akan kecil saja peranannya di masyarakat, atau pengelolaan masjid tidak rapi, karena kurang orang atau kurangnya kerjasama.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Dan yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi *nazhir* adalah wakif, atau mungkin saja

wakif itu sendiri yang menjadi *nazhir*. Seperti halnya yang terjadi di Masjid Sugihwaras.

a. Asal Mula Berdirinya Masjid AT-TAQWA Sugihwaras

Masjid AT-TAQWA sebelum terbentuk sebuah bangunan Mesjid megah dahulunya adalah sebuah pekarangan kosong milik H. Anwar beserta istrinya (Ibu Tiwi), karena masih minimnya tempat peribadatan yang berada di Dusun Sugihwaras lalu beliau berniat untuk mewakafkan pekarangan di depan Rumahnya juga untuk dijadikan sebuah Musholla, yang nantinya dipakai untuk sholat berjamaah bagi warga sekitar Dusun Sugihwaras dan sekitarnya. Setelah bangunan musholla terealisasi maka beliau sendiri jugalah yang menjadi *nazhir* sekaligus pengurusnya, dan karena banyaknya respon positif dari warga sekitar Dusun Sugihwaras dalam berjamaah dan melaksanakan kegiatan keagamaan hingga Musholla tersebut tidak cukup untuk menampung warga yang melaksanakan kegiatan shalat berjamaah. Lalu H. Anwar pun berinisiatif untuk membesarkan bangunan Musholla dan menjadikannya sebuah masjid, hingga pada tahun 1933 terbentuklah sebuah masjid dan diberi nama dengan Masjid AT-TAQWA, dan Masjid inipun juga mendapatkan sumbangan berupa sawah dari H. Anwar sendiri seluas 400 Ru, juga dari

Ibu Hj. Siram ± 180 Ru, yang mana hasil dari sawah nantinya akan dipakai untuk kepentingan Masjid ini sendiri.⁴

Pada sekitar tahun 1950 H. Anwar meninggal dunia, kepengurusan pun dilanjutkan oleh H. Ali beserta jajarannya, pada periode H. Ali tidak banyak perkembangan yang ada dari bentuk fisik masjid, hanya saja dari segi Agamis yang bertambah karena mulai diadakan pengajian rutin ba'da maghrib bagi anak-anak kecil dan remaja yang ingin mengaji, dan pada periode ini masjid juga mendapatkan sumbangan berupa tanah pekarangan dari Bu Kati seluas 10Ru, dan juga dari Ibu Sulianah berupa tanah pekarangan seluas 4,43Ru, karena mendapat tanah wakaf berupa pekarangan di sekitar masjid itu sendiri, maka pada periode H. Ali masjid pun sedikit di luaskan di bagian imaman, hingga bentuk bangunan pun bertambah sedikit dibagian baratnya.⁵

Pada tahun 1966 kepengurusan pengelolaan masjid beralih kepada H. Manshur beserta jajaran, masjid kembali mendapatkan sumbangan tanah wakaf berupa pekarangan seluas 6, 60 Ru dari Ibu Utik utami, H. Manshur memegang kepengurusan sebagai ketua (ta'mir) selama 20 tahun, akan tetapi tak ada pembangunan masjid secara signifikan baik dari dalam maupun luarnya, entah karena masih kuatnya paham mayoritas yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf yang

⁴ Mbah Hamdah, *Wawancara*, Sugihwaras, 17 Juli 2010

⁵ Shonhaji Aly, *Wawancara*, Sugihwaras, 17 juli 2010

lebih mementingkan aspek keabadian suatu benda dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya.

Pada pertengahan tahun 2000 kepengurusan pun beralih kepada H. Muhajir Aly sebagai ketua ta'mir hingga kini, dan masjid AT-Taqwa pun kembali mendapatkan sumbangan tanah wakaf berupa sawah seluas 1, 90 Ru dari H. Muhajir sendiri, sawah seluas 50 Ru dari H. Chalid Aly, sawah 110 Ru dari H. Abu amin, dan Tegal seluas 50 Ru dari Bu Paimah, pada periode H. Muhajir Masjid pun dirombak total mulai dari segi bangunan (fisik) ditingkat menjadi bangunan 2 lantai untuk menambah tempat bagi jama'ah, tidak hanya itu banyak kegiatan yang ditambah, diantaranya di depan masjid yang masih merupakan tanah wakaf kosong dibangun sebuah Diniyah yang fungsinya untuk kegiatan belajar mengaji bagi anak-anak sekitar, juga di masjid setiap ba'da subuh diadakan kuliah subuh, juga pengajian bagi Ibu-ibu Muslimat.⁶

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya pengelola harta wakaf (*nazhir*) mulai dari periode pertama sampai pengelola harta wakaf (*nazhir*) sekarang yang berada di Dusun Sugihwaras, cara pengelolaanya masih tergolong sangat tradisional, meskipun dalam penyaluran harta wakaf sudah bagus dalam artian memanfaatkannya guna kepentingan umat, akan tetapi dalam hal menjaga (pengamanan) objek wakaf masih

⁶ Moh. Najib, *Wawancara*, Sugihwaras, 17 Juli 2010

tradisional, karena objek wakaf yang berupa tanah masjid masih belum disertifikasi.

b. Struktur Kepengurusan Masjid AT-TAQWA Sugihwaras

Masjid tidak hanya merupakan sarana untuk melaksanakan ibadah shalat, masjid pun juga bisa dijadikan tempat mengayomi dan membina umat disekitarnya secara aktif. Masjid juga tidak lagi hanya berarti bangunan tempat shalat, atau bahkan bertayammum sebagai cara bersuci pengganti wudlu, tetapi masjid juga menjadi tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT.

Jadi dengan luasnya fungsi dan tugas masjid, maka tidak mungkin pengelolaan masjid dilaksanakan oleh satu orang ataupun kelompok kecil orang. Sebab bila dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil, maka masjid akan hanya kecil saja peranannya di masyarakat, atau pengelolaan masjid tidak rapi, karena kurang orang dan kurang kerjasama.

Sebuah masjid harus mempunyai kepengurusan, hal semacam ini telah merata disadari oleh umat Islam, begitu halnya periode kepengurusan yang dipegang oleh H. Muhajir Aly selain Pelindung, Penasihat, Sekertaris, dan Bendahara, mulai juga membagi kepengurusan menjadi 6 seksi-seksi, dan berikut susunan kepengurusan yang berada di Masjid At-Taqwa saat ini:

SUSUNAN KEPENGURUSAN TA'MIR MASJID "AT-TAQWA"

SUGIHWARAS NGORO JOMBANG Th: 2009-2010⁷

PELINDUNG : Kepala Desa (MOH. ZEN)

PENASEHAT : K. H. MANSUR

H. ABD. MUTHOLIB

KETUA : H. MUHAJIR ALI

SHORIMUDDIN

SEKRETARIS : MOH. NAJIB

HINDIN NURWAHID HID.

BENDAHARA : H. MASYHUDI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOH. FATIH

SEKSI-SEKSI

1. Seksi perwakafan : Ketua : Ismail
Anggota : Mu'minin
2. Seksi Pembangunan : Ketua : Ferri Mulyanto
Anggota : Jumadi
H. Abd. Hadi
3. Seksi Peribadatan : Ketua : H. Moh. Shodiq
Anggota : A. Riyadi
Adelan

⁷ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Ta'mir Masjid Jami' "AT-TAQWA" Dusun Sugihwaras

4. Seksi Pendidikan : Ketua : Imtoha
Anggota : H. Suhadi
5. Seksi Sosial : Ketua : Sadi
Anggota : Masrukin
Moh. Thohir
Umar
6. Seksi Remas : Ketua : Moh. Sumari
Anggota : Sutrisno
Sukardi
Abd. Majid
7. Seksi Humas : Ketua : Sumpomo
Anggota : Mulyono
Abd. Qodir
Tri Mulyanto

Tidak seperti dahulunya kepengurusan masjid inipun juga didokumentasikan, karena sebelum periode H. Muhajir kepengurusan masjid hanya sebatas ucapan lisan meskipun ditulis akan tetapi tidak didokumentasikan sehingga setelah berganti ketua ta'mir maka bergantilah semua kepengurusan yang ada.⁸

c. Daftar Tanah Milik Masjid Jami' "AT-TAQWA" Sugihwaras Ngoro Jombang

Secara etimologis, wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habsh yang artinya menahan. menurut golongan Syafi'i wakaf artinya:

“menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridloan Allah SWT. Berpijak dari dasar tersebutlah kemungkinan banyak dari warga Dusun Sugihwaras berbondong-bondong mewakafkan sebagian hartanya guna kepentingan masjid dengan niatan agar mendapatkan keridloan dari Allah

⁸ Udin Bisri, *Wawancara*, Sugihwaras, 16 Juli 2010

SWT. Dan berikut daftar tanah milik masjid At-Taqwa Dusun Sugihwaras berserta nama para pewakafnya:

TABEL 3.5

Daftar Tanah Wakaf Milik Masjid Jami' AT-TAQWA

Sugihwaras Ngoro Jombang

Tahun 2010⁹

No	Luas Tanah	Jenis	Tempat	Tanah Wakaf Asal Dari
1	37, 46 RU	Pekarangan	Sugihwaras	1. H. Anwar Sugihwaras 2. Ibu Kustiwi Sugihwaras
2	179 RU	Sawah	Ketawang	Bu Siram ketawang
3	400 RU	Sawah	Sugihwaras	H. Anwar Sugihwaras
4	10 RU	Pekarangan	Sugihwaras	Bu Katri Sugihwaras
5	4,43 RU	Pekarangan	Sugihwaras	Sulianah Sugihwaras
6	6,60 RU	Pekarangan	Sugihwaras	Utik utami Sugihwaras
7	190 RU	Sawah	Cermenan	H. Muhajir Ali Sugihwaras
8	50 RU	Sawah	Cermenan	H. Cholid Ali
10	110 RU	Sawah	Sugihwaras	H. Abu Amin Sugihwaras
11	50 RU	Tegal	Sugihwaras	Bu Paimah Panji Sugihwaras

Keterangan Jumlah :

- 37, 46 : Untuk bangunan Masjid dan diniyah
 21, 03 : Untuk pekarangan (kosong)
 50 : Untuk pertanian (tegal)
 929 : Untuk Pertanian (sawah)

⁹ Laporan Tanah Wakaf Milik Masjid Jami' "AT-TAQWA" Dusun Sugihwaras

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Sugihwaras.

Berbicara mengenai pengelolaan wakaf, khususnya pengelolaan wakaf yang berada di Masjid AT-TAQWA Dusun Sugihwaras, cara pengelolaannya terbilang masih tradisional. Terlihat dari *nazhir* yang berada di Dusun Sugihwaras yang masih sangat mempercayakan kepada tokoh masyarakat, dan belum mau mensertifikasi objek wakafnya karena faktor kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat lainnya, dan lemahnya kemauan *nazhir* dalam urusan administrasi yang dinilai terlalu banyak prosedur yang harus diurusi.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat Sugihwaras tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tanah wakaf yang diatasnya terbangun Masjid AT-TAQWA masih aman-aman dan terpelihara cukup baik, sehingga masyarakat tetap percaya dan tidak mempermasalahkan tentang hal pelegalan tanah wakaf yang masih belum dilaksanakan oleh *nazhir* yang ada, masyarakat juga menganggap itu merupakan suatu hal yang wajar mengingat *nazhir* yang ada masih tergolong *nazhir* biasa yang berada di perkampungan.¹¹

¹⁰ Moh. Zen, *Wawancara*, Sugihwaras, 16 Juli 2010

¹¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PROFESIONALITAS *NAZHIR* DALAM MENGELOLA HARTA WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG

A. Profesionalitas *Nazhir* di Dusun Sugihwaras Perspektif Hukum Islam

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepadanya.¹ Meskipun wakaf secara khusus tidak ditemukan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan agar seorang muslim mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dalam hal kebajikan bagi masyarakat.

Dalam penelitian lapangan yang ada di masyarakat Sugihwaras, *nazhir* yang berada di dusun Sugihwaras dinilai telah bagus bila dilihat dari segi kemaslahatan, karena *nazhir* di dusun Sugihwaras mempunyai inisiatif untuk mengembangkan harta wakaf yang ada, dengan cara menyewakan tanah wakaf berupa persawahan dan tegal yang dimiliki oleh masjid AT-TAQWA dan hasil dari sewa tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umat dengan cara

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam....*, 371

memperindah dan memperluas bangunan masjid, juga membuka lembaga pendidikan TPQ bagi anak-anak sekitar, bahkan banyaknya kegiatan yang bersifat positif yang diadakan oleh *nazhir*, seperti diadakannya kuliah subuh, mengaji Al-Qur'an ba'da maghrib. Namun disisi lain *nazhir* yang ada masih belum melegalkan obyek wakaf yang ada di situ, karena tingginya sikap saling percaya antar masyarakat satu dengan yang lain di masyarakat Sugihwaras.

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling bertanggung jawab untuk merawat harta wakaf tersebut adalah seorang *nazhir*, karena berhasil atau tidaknya pengembangan dan juga kemaslahatan harta wakaf bergantung dari bagaimana cara *nazhir* tersebut mengelolanya. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id kepemilikan atas barang wakaf apabila sudah diwakafkan maka akan menjadi milik Allah, yakni terlepas dari kepemilikan pribadi seseorang. Maka barang wakaf tidak menjadi milik orang yang mewakafkan (*wakif*), juga tidak menjadi milik penerima wakaf (*mauquf 'alaih*). Karena hak atas barang wakaf terlepas dari ikatan seseorang, maka agama memerintahkan harus ada orang yang mengelola dan merawat benda wakaf, yang dalam fiqih disebut *nazhir*.

Dalam kaitan pengelolaan masjid, kepengurusan masjid terbagi menjadi dua macam. Yakni, *nazhir* dan *qoyyim*. *Nazhir* adalah orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf. Sedangkan *qoyyim* adalah pekerja lapangan yang bertugas membantu *nazhir* dalam menjaga, merawat serta memakmurkan masjid.

Penentuan orang yang bertugas sebagai *nazhir* dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh *wakif*, artinya *wakif* mempunyai hak untuk menunjuk siapa yang akan mengurus harta yang diwakafkan. Apabila *wakif* tidak menunjuk seseorang yang bertugas sebagai *nazhir*, maka tokoh masyarakat (*ṣulāḥa'ul balad*) wajib menunjuk seseorang yang bertugas sebagai *nazhir*, jika tidak maka ia berdosa. *Nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif* atau dibentuk oleh tokoh masyarakat dapat terdiri dari beberapa orang yang salah satunya ditunjuk sebagai ketua yang memiliki tanggung jawab penuh atas tugas-tugas *nazhir*. Pejabat *nazhir* yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan, *pertama, Islam* yakni, beragama Islam, *kedua, al-'adalah* atau orang dapat dipercaya dan berkelakuan baik, *ketiga, al-kifāyah wal ihtida' ila at-taṣaharruf* atau orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola harta wakaf.

Asas pengelolaan harta masjid adalah kemaslahatan yang kembali kepada masjid. Artinya segala kebijakan yang diambil oleh *nazhir* harus selalu mengacu kepada kepentingan masjid. Penggunaan harta masjid tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi atau lembaga diluar masjid yang bersangkutan. Harta masjid tidak sah dihibahkan, dipinjamkan dan dihutangkan kepada pihak manapun, karena masjid sebagai lembaga bukan tergolong *ahliyat al-tabarru'* (yang dapat berderma dan memberi pinjaman).

Nazhir masjid juga dituntut untuk sedapat mungkin mengembangkan harta masjid yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Bahkan jika dimungkinkan,

harta masjid yang tidak sedang dibutuhkan untuk keperluan masjid. Dalam usaha mengembangkan harta masjid, *nazhir* dituntut untuk berlaku hati-hati sebelum memutuskan. Resiko kerugian harus secara cermat diperhitungkan.

Harta yang dimiliki oleh masjid harus disalurkan sesuai dengan keperuntukannya. Penggunaan harta masjid secara umum terbagi menjadi dua,

Pertama, Imaroh, yaitu segala kebutuhan masjid yang berkaitan dengan fisik masjid, seperti pembangunan fisik, pagar, cat dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini, keperluan masjid yang berkaitan dengan kebersihan masjid dan peralatannya, seperti sapu dan lain-lain, juga gaji yang diberikan untuk petugas kebersihan masjid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Masolih, yaitu segala kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan masjid, seperti keperluan fisik masjid. Sebagaimana dalam bagian pertama atau keperluan-keperluan lainnya, seperti karpet, penerangan masjid, pengeras suara bahkan makanan yang disajikan untuk para jama'ah jika diperlukan untuk meramaikan masjid, dan lain-lain. Bagian ini sifatnya lebih umum dari bagian pertama.

Harta masjid yang didapat dari wakaf, harus disesuaikan dengan keperuntukan wakaf tersebut. Jika didapat dari hasil wakaf untuk pembangunan masjid (*imaroh*), maka hasil wakaf tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pembangunan masjid, dan jika didapat dari hasil wakaf untuk kebutuhan masjid (*masolih*) atau tidak ada penjelasan secara rinci dari *wakif*, maka hasil wakaf

dapat dipergunakan untuk semua kepentingan masjid. Demikian juga harta yang didapat dari hibah, jika penyumbang menyatakan pemberian tersebut hanya untuk pembangunan misalnya, maka sumbangan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk hal yang berkaitan dengan pembangunan masjid, dan apabila tidak dinyatakan, maka dapat dipergunakan untuk semua kepentingan masjid.

Dilihat dari penerapan dan penggunaan harta wakaf oleh *nazhir* yang berada di dusun Sugihwaras sudah benar menurut teori hukum Islam, akan tetapi secara hukum positif masih dirasa kurang, karena hingga sampai saat ini tanah wakaf yang berada di dusun Sugihwaras masih belum dilegalkan seperti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, yang didalamnya telah memberi aturan bahwasannya Tanah wakaf harus di sertifikasi.

Tidak dapat dipungkiri juga praktik pelaksanaan wakaf semacam ini pada nantinya bisa juga menyebabkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *kulliyah* sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب الصالح

“Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik kemaslahatan”.

Dalam hukum positif telah diatur bahwasannya tanah wakaf harus di sertifikasi yang gunanya untuk melindungi tanah tersebut agar tidak timbul persengketaan-persengketaan pada akhirnya nanti. Karena dalam Islam kita telah diperintahkan oleh Allah agar mengikuti semua aturan yang telah diputuskan oleh seorang kepala Negara, hal itu telah disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٥٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu.."*²

Pada ayat di atas Allah dengan tegas memerintahkan kepada hambanya selain taat kepada Allah dan Rasulnya, umat Islam juga harus taat kepada Ulil Amri. Jadi dari sini dapat ditarik benang merah, bahwasannya *nazhir* yang berada di dusun Sugihwaras telah bagus bila dipandang dari sisi pemanfaatan harta wakaf, akan tetapi masih dinilai kurang dan tidak profesional bila dipandang dari kaca mata Hukum Positif.

B. Profesionalitas *Nazhir* di Dusun Sugihwaras Perspektif Hukum Positif

Di dalam hukum positif dalam melakukan hal perwakafan, aspek penting lainnya ialah aspek pengelolaan harta wakaf, yang mana pengelolaan harta

² Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, 128

tersebut dilaksanakan oleh seorang *nazhir*, karena seorang *nazhir* disini menjadi top manajer. Tidak hanya mengelola saja, akan tetapi juga menjaganya.

Dalam realita lapangan, *nazhir* yang berada di dusun Sugihwaras dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf yang ada sudah sangat bagus sekali karena *nazhir* disitu sudah bisa mengolah bahkan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri dengan cara menyewakan tanah-tanah persawahan yang dimiliki oleh masjid AT-TAQWA dan hasil dari penyewaan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan kepentingan masjid yang lain, bahkan bisa menghidupkan sebuah TPQ untuk mengaji anak-anak yang berada di dusun tersebut, bahkan *nazhir* yang ada juga mempunyai inisiatif mengisi kegiatan masjid dengan hal-hal yang positif, secara fisik pengelolaan harta wakaf yang berada di dusun Sugihwaras sudah tersalur cukup baik, karena bisa bermanfaat untuk kepentingan masjid itu sendiri bahkan bisa dikatakan berhasil dalam hal pengelolaan, akan tetapi *nazhir* yang berada di masjid AT-TAQWA dusun Sugihwaras masih belum mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, karena sampai saat ini *nazhir* yang berada di masjid AT-TAQWA Dusun Sugihwaras masih belum melegalkan (sertifikat) obyek wakaf yang berupa tanah dan harta masjid yang berbentuk persawahan.

Karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan yang ada, seorang *nazhir* mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dan salah satu bentuk pengadministrasian yang masih belum dilaksanakan oleh *nazhir* di dusun Sugihwaras adalah melegalkan obyek wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Karena apabila terjadi sesuatu yang menyangkut harta wakaf yang ada, *nazhir* tidak mempunyai bukti validitas legal yang menunjukkan bukti harta wakafnya.

Pada kenyataannya, perwakafan yang ada di Indonesia masih sangat sulit berkembang, begitu juga halnya dengan perwakafan yang berada di dusun Sugihwaras, salah satu faktor yang menjadi penghambat perkembangannya adalah karena keberadaan *nazhir* yang masih tradisional, terbukti dengan melihat *nazhir* yang ada yang masih mengandalkan faktor jujur dan saling percaya antar masyarakat satu dengan yang lainnya tanpa memperdulikan hal-hal yang bersifat administratif.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis setidaknya seorang *nazhir* wakaf hendaknya memiliki beberapa kriteria khusus, yakni:

1. Bertanggung jawab, dan
2. Memiliki kemampuan secara manajerial.

Karena seorang *nazhir* wakaf memiliki posisi yang sangat urgent dalam perwakafan, karena *nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan

mengurusi wakaf, seorang *nazhir* merupakan instrument penting dalam perwakafan.

1. Bertanggung Jawab

Wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggung jawaban tersebut adalah dengan cara pengelolaan secara sungguh-sungguh, menjaganya dari segala hal, dan juga semangat yang didasarkan bertanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan-Nya.

Dan seorang *nazhir* juga mempunyai beban amanah yang tidak ringan karena disamping mewujudkan niat para *wakif*, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, mereka juga harus mempertanggungjawabkan secara vertikal baik sebagai pribadi maupun kelompok (*nazhir*). Pertanggung jawaban kepada Allah SWT ini mendasari seluruh pertanggung jawaban berikutnya. Sehingga jika seseorang sudah memiliki tanggung jawab kepada Allah, dalam posisi apapun, maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Dan keikhlasan bagi setiap posisi memiliki porsi sendiri-sendiri. Bagi seorang *wakif*, dia akan merasa sangat lepas tanpa pengharapan yang bersifat duniawi atas perbuatan yang dilakukannya. Sementara bagi seorang *nazhir*, apa yang menjadi tanggung jawabnya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, berkualitas dan didasari pada niatan yang tulus. Namun, ketulusan seorang *nazhir* tidak selalu dipahami sebagai amal sosial yang

tidak perlu diberi imbalan secara pantas. Karena ketulusan bagi seorang *nazhir* terletak pada aspek niatan baik.

Selain itu seorang *nazhir* juga harus memiliki rasa pertanggung jawaban kepada hukum. Pertanggungjawaban secara hukum memang memiliki aspek yang sangat luas, tidak terbatas pada hukum positif yang selama ini ada, tapi juga hukum syari'at yang secara khusus mengatur tentang perwakafan. Sehingga dengan demikian, ibadah wakaf yang sifatnya amal sosial, tetapi tetap memiliki kerangka dan landasan hukum yang sangat jelas. Dengan adanya payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses pengelolaan wakaf dapat dijadikan rujukan demi terlaksananya amal-

amal kebajikan.

2. Memiliki kemampuan secara manajerial

Menejemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan bermanfaat atau tidak benda wakaf itu tergantung pada pola pengelolaan. Kalau pengelolaan harta benda wakaf selama ini hanya dikelola apa adanya dengan menggunakan menejemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem menejemen yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas menejemen ini seharusnya dijadikan semangat pengelolaan harta benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nazhir* yang berada di dusun Sugihwaras memandang bahwa *nazhir* yang profesional adalah seorang *nazhir* yang bisa mengelola harta wakaf dengan baik dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Seperti menjaga, merawat masjid, serta memproduktifkan harta wakafnya (harta wakaf masjid).
2. Dalam realita lapangan, *nazhir* yang berada di dusun Sugihwaras dipandang dari segi Hukum Islam dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf yang ada sudah sangat bagus sekali karena *nazhir* disitu sudah bisa mengolah bahkan mengembangkan harta wakaf tersebut dengan cara menyewakan tanah-tanah persawahan yang dimiliki oleh masjid AT-TAQWA, dan hasil dari penyewaan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan kepentingan masjid yang lain, bahkan bisa menghidupkan sebuah TPQ untuk mengaji anak-anak yang berada di dusun tersebut, bahkan *nazhir* yang ada juga mempunyai inisiatif mengisi kegiatan masjid dengan hal-hal yang positif. Secara fisik pengelolaan harta wakaf yang berada di dusun

Sugihwaras sudah tersalur cukup baik, karena bisa bermanfaat untuk kepentingan masjid itu sendiri bahkan bisa dikatakan berhasil dalam hal pengelolaan.

3. Nazhir yang berada di Dusun Sugihwaras apabila dipandang dari segi Hukum Positif. Dinilai masih belum sampai menjadi seorang nazhir yang Profesional, Karena masih belum menjalankan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diantaranya adalah masih dinilai belum Amanah dan mampu secara jasmani dan rohani sesuai dengan pasal 10, dan juga masih belum mengadministrasikannya sesuai dengan tugas-tugas nazhir yang telah diatur pada pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

Perwakafan yang berada di Dusun Sugihwaras untuk nazhir yang ada hendaknya segera melegalkan obyek wakafnya untuk mendapatkan jaminan hukum agar terhindar dari permasalahan-permasalahan persengketaan yang sering terjadi dalam hal perwakafan. Karena harta wakaf yang berada di Dusun Sugihwaras terbilang memiliki jumlah yang sangat banyak dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2010

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetya, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab*, Kediri: Al-Falah, 2009

Achmad Djunaidi dan Thoebieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi, 2006

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Ahmad Warsan Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978

Daut Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988

Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Depag RI, *Peraturan Perwakafan (Waqf Regulation)*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Direktorat Urusan Agama Islam, 1988

Depag RI, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Departemen Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2005

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006

Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Serajaya, 1985

Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Emy Chulaimi, *Wakaf Perspektif Hukum Nasional*, Profesionalisme Nazhir, Jombang: Tesis, 2001

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rasda Karya, 2000

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973

Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Muchsin, *Lembaga Wakaf Potensial dalam Mengembangkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: IKAHI, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XX No. 238, 2005

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001

Muhibbul Aman Aly, "Wakaf, Masjid, Pondok dan Madrasah", dalam <http://www.artikelkeislaman.com>

Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005

Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Rahmat Djatmika, H. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)*, Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, Juz VII, Damaskus: Darul Fikr, 1985

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006